RENCANA STRATEGIS

2020-2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Periode 2020-2024 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan bagi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini juga disusun untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Renstra ini disusun dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024. Implementasi Renstra ini ditujukan untuk mendukung pencapain target dan janji Presiden pada sektor Kelautan dan Perikanan. Sistem *good governance* harus diupayakan dapat berlangsung secara optimal, efektif dan efisien untuk menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, kemandirian ekonomi yang lebih baik, serta memaksimalkan pencapaian target-target yang telah direncanakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Renstra ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Renstra.

Jakarta, Agustus 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,

Safri Burhanuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1 Kondisi Umum 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Capaian Pembangunan Sumber Daya Maritim 2015 - 2019 6

1.2.1 Capaian Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 6

1.2.2 Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) 7

1.2.3 Produksi Perikanan Tangkap 8

1.2.4 Produksi Perikanan Budidaya 9

1.2.5 Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 9

1.2.6 Produksi Garam 10

1.3 Profil Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 11

2 Potensi dan Permasalahan 12

2.1 Potensi 12

2.2 Permasalahan 14

BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN 16

1 Visi 16

2 Misi 17

3 Tujuan 17

4 Sasaran Strategis 18

4.1 Stakeholder Perspective 23

4.2 Customer Perspective 25

4.3 Internal Business Process 29

4.4 Learning and Growth Perspective 30

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 33

1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 33

2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 38

3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 40

4 Kerangka Regulasi 42

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 44

1 Target Kinerja 44

1.1 Indikator Sasaran Strategis 44

1.2 Indikator Kinerja Program 47

1.3 Indikator Kinerja Kegiatan 48

2 Kerangka Pendanaan 51

BAB 5 PENUTUP 53

Daftar Gambar, Grafik dan Tabel

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta WPPN RI 3
Gambar 2 Struktur Organisasi Deputi SD Maritim 12
Gambar 3 Peta Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi 19
Gambar 4 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 20
Gambar 5 Prioritas Nasional 1 35
Gambar 6 Prioritas Nasional 2 35
Gambar 7 Prioritas Nasional 3 36
Gambar 8 Prioritas Nasional 6 36

Daftar Grafik

Grafik 1 Perbandingan Nilai Komoditas Ekspor Produk Perikanan 10
Grafik 2 Mapping Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 49

Daftar Tabel

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019 6
Tabel 2 Draft Indikator 10 Goal Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia. 8
Tabel 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024 20
Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024 45
Tabel 5 Indikator Kinerja Program (IKP) 47
Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 49

BAB

1

PENDAHULUAN

1 Kondisi Umum

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Secara alamiah, perairan Indonesia merupakan perlintasan utama sistem sirkulasi air panas dunia dan di dalamnya terjadi berbagai fenomena kelautan. Hal ini menjadikan perairan Indonesia berperan penting dalam sistem dan tata iklim dunia. Kondisi ini juga mengakibatkan perairan Indonesia kaya akan keanekaragaman dan kekayaan hayati.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya maritim yang sangat besar dan beragam, yang terdiri atas bermacam jenis ikan, terumbu karang, padang lamun, hutan *mangrove*, rumput laut, jasa-jasa kelautan dan keanekaragaman hayati lainnya. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumber Daya Ikan (SDI) di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis

tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, beberapa jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Pemanfaatan sumber daya maritim tersebut harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam menyediakan sumber pangan dan kehidupan bagi masyarakat.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu menjadi "sarana" bagi regulator untuk dapat mengatur sumber daya sekaligus mengelola aktivitas laut dan pesisir dengan lebih baik. Hal ini telah diadopsi dalam Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Amanah dari UU tersebut khususnya pada sisi perencanaan yaitu Rencana Zonasi-WP3K, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan Rencana Tata Ruang Laut.

Pendekatan pembangunan kelautan dan perikanan yang memberikan ruang pengelolaan sesuai karakteristik wilayah pengelolaan perikanan. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN RI) merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang WPPN RI terdapat 11 WPPN RI yang pembagian zonasinya dapat dilihat pada Gambar 1.

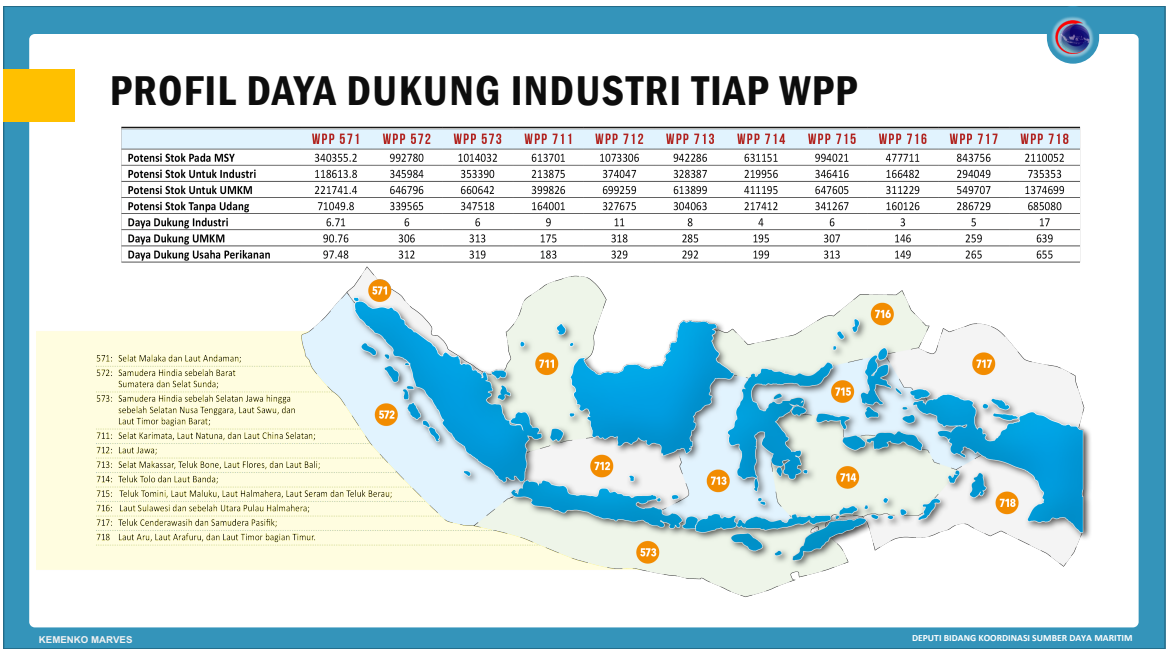

	WPP 571	WPP 572	WPP 573	WPP 711	WPP 712	WPP 713	WPP 714	WPP 715	WPP 716	WPP 717	WPP 718
Potensi Stok Pada MSY	340355.2	992780	1014032	613701	1073306	942286	631151	994021	477711	843756	2110052
Potensi Stok Untuk Industri	118613.8	345984	353390	213875	374047	328387	219956	346416	166482	294049	735353
Potensi Stok Untuk UMKM	221741.4	646796	660642	399826	699259	613899	411195	647605	311229	549707	1374699
Potensi Stok Tanpa Udang	71049.8	339565	347518	164001	327675	304063	217412	341267	160126	286729	685080
Daya Dukung Industri	6.71	6	6	9	11	8	4	6	3	5	17
Daya Dukung UMKM	90.76	306	313	175	318	285	195	307	146	259	639
Daya Dukung Usaha Perikanan	97.48	312	319	183	329	292	199	313	149	265	655

Gambar 1 Peta WPPN RI

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi sektor kelautan dan perikanan, target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah penerapan model transformasi WPP di 3 (tiga) lokasi sebagai *pilot project* pengembangan kawasan WPP.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2.8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%). Sesuai dengan visi presiden untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan, maka akan dibentuk klaster kawasan perikanan budidaya untuk mengintegrasikan kebutuhan budidaya mulai dari tahap persiapan sampai dengan pasca panen. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain penyiapan benih dan indukan berkualitas, obat dan pakan yang terdaftar, penerapan padat tebar yang stabil, pengelolaan limbah, sistem *biosecurity*, pengawasan dan pengendalian penyakit sampai dengan sistem pemasaran.

Target perikanan budidaya dalam RPJMN 2020-2024 adalah 1) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya ikan sebesar 8,5% per tahun serta meningkatkan pertumbuhan ekspor udang sebesar 8% per tahun; 2) Peningkatan ekspor udang sebesar 250% pada tahun 2024; 3) Pertumbuhan produksi rumput laut menjadi 12,3 juta ton, peningkatan produksi ikan menjadi 20,4 juta ton pada tahun 2024. Selain itu juga peningkatan ekspor perikanan menjadi senilai USD 8,2 Miliar.

Pengembangan perikanan budidaya laut dipandang penting untuk mendukung target peningkatan produksi ikan sesuai dengan RPJMN 2020-2024 sebesar 20,42 Juta ton dan produksi rumput laut sebesar 12,33 Juta ton pada tahun 2024. Kinerja pembangunan perikanan budidaya dalam periode 2015-2019 menunjukan bahwa sektor tersebut telah mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran penting perikanan budidaya juga tercermin dari peningkatan volume dan nilai produksi yaitu sebesar 11,47% dan 21,72% pada periode 2012-2017.

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah yang perlu dibarengi dengan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut. Sebagaimana diketahui, produk kelautan dan perikanan merupakan komoditas yang mudah rusak (*perishable*), sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan stabilitas sistem produksi dan pemasaran, penguatan konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien, dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan produk kelautan dan perikanan, serta informasi dari hulu hingga hilir yang melibatkan sinergi berbagai K/L.

Industri perikanan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu untuk mewujudkan sektor perikanan Indonesia yang maju, mandiri, kuat dan berbasis kepentingan nasional telah ditetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 2016. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan

kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan devisa negara. Presiden menginstruksikan kepada Menko Maritim dan Investasi termasuk didalamnya mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan dan pengawasan kegiatan pembangunan perikanan nasional. Salah satu bentuk dukungan Kemenko Maritim dan Investasi dalam pembangunan perikanan nasional adalah melakukan koordinasi pembangunan industri pengolahan produk perikanan.

Salah satu industri kelautan yang akan dikembangkan adalah industri pergaraman nasional. Pengembangan industri ini memperhatikan urgensi sebagai berikut 1) pemenuhan kuantitas produksi garam industri nasional; 2) peningkatan kualitas produksi garam rakyat; 3) pemberian nilai tambah terhadap produk garam rakyat; dan 4) pengendalian harga garam nasional.

Pembangunan industri pengolahan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dalam hal pemanfaatan peningkatan *marine bioproduct* dan bioteknologi. Pembangunan industri HPI merupakan salah satu upaya peningkatan ekonomi nelayan melalui peningkatan nilai tambah dan penyediaan diversifikasi produk protein tinggi berbahan baku ikan serta membantu penurunan angka *stunting*. Pentingnya pengembangan HPI dilihat dari keunggulannya yang sudah dilakukan uji empirik karena yang mana mengandung asam amino esensial lebih tinggi jika dibandingkan dengan sumber protein bahan tambahan pangan lainnya seperti susu, kedelai dan whey. Model pengembangan HPI menggunakan skema kemitraan melalui integrasi proses dari hulu ke hilir dengan penyiapan 2 skema bisnis terintegrasi yang memiliki kapasitas produksi 2 ton per bulan atau 20 ton per bulan.

Hilirisasi adalah suatu proses bagian dari peningkatan nilai tambah pada suatu produk yang melibatkan aspek riset dan SDM. Nilai tambah didapatkan sebuah produk dari kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan distribusi yang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin bagian yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Peran riset dan pengembangan SDM akan sangat mempengaruhi peningkatan nilai tambah yang

menguntungkan secara ekonomis. Prinsip dari nilai tambah tersebut diarahkan sesuai dengan konsep *blue economy* yang adalah *nature's efficiency, zero waste, socialinclusiveness, cyclic systmens of production, innovation and adaptation*. Untuk itulah, komponen riset dan pengembangan

1.2 Capaian Pembangunan Sumber Daya Maritim 2015 - 2019

1.2.1 Capaian Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Merujuk kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat perubahaan nomenklatur dari Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa (SDAJ) menjadi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas Pokok dan Fungsi Deputi SDAJ mencakup beberapa sektor yaitu Sektor Perhubungan, Sektor Energi dan Mineral, Sektor Pariwisata, Sektor Lingkungan Hidup dan Sektor Kelautan dan Perikanan. Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi SDAJ dalam periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019

SASARAN STRATEGIS/IKU	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis (*Outcome*) 1 Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa					
Indikator 1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang diselesaikan;	8	8	8	8	8
2. Persentase rekomendasi/rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	90%

Sasaran Strategis (*Outcome*) 2 Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa					
Indikator 1. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa;	3	3	3	3	3
2. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti	70%	70%	80%	85%	90%
Sasaran Strategis (*Outcome*) 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa					
Indikator 1. Jumlah dokumen tentang perencanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	1	1	1	1	1
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	80%	80%	90%	100%	100%
3. Jumlah dokumen bidang tata usaha dan pelaporan	1	1	1	1	1
4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, penyelesaian layanan urusan keuangan, penyelesaian layanan tata naskah, arsip dan dokumentasi, laporan keuangan dan tindak lanjut LHP	80%	80%	90%	100%	100%

Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019

1.2.2 Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Saat ini *Ocean Health Index* (OHI) memberikan referensi yang baik untuk secara kuantitatif dalam 10 goal menilai status lingkungan laut dengan mempertimbangkan dimensi fitur biologis, fisik, ekonomi dan sosial dari laut. OHI telah disahkan oleh *World Economic Forum*, yang selanjutnya diharapkan menjadi indikator dalam Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan Tujuan 14: Ekosistem Lautan. Pusat Riset Kelautan KKP telah mengembangkan OHI+ = IKLI sejak tahun 2016, dan hingga akhir tahun 2019 bersama Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa telah dihasilkan Draft Indikator 10 *Goal* berupa Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia. Kesepuluh goal tersebut, antara lain:

Tabel 2 Draft Indikator 10 Goal Rancangan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

No	Target/Tujuan	Variabel	K/L
1.	Sumber pangan	Ikan, penangkapan, budidaya	KKP, MENKO MARITIM
2.	Mata pencaharian nelayan tradisional, skala kecil	Nelayan tradisional, akses ke sumberdaya, pendapatan, produksi, surplus produksi	KKP, MENKO MARITIM
3.	Produk alam lainnya	Produk farmasi, bahan baku industri, garam industri, garam konsumsi	DEPERIN, BUMN
4.	Sumber Carbon Biru	luasan mangrove, kondisi mangrove, rehabilitasi, reboisasi., manajemen	KKP, KLHK
5.	Perlindungan pesisir	terumbu karang, hutan pesisir, ekosistem lamun, reklamasi, konversi lahan pesisir	LIPI, BIG,
6.	Keberlanjutan Ekonomi Kelautan	Perhubungan, transportasi, perikanan, industri maritim. Pendapatan daerah/negara,	DEPHUB, BPS, KKP
7.	Pariwisata	daya dukung, jumlah wisatawan, pendapatan RT, pendapatan daerah	DEP PARIWISATA
8.	Kekhasan Ekosistem	Focal species, keragaman spesies, produksi spesies komersial, perlindungan tempat khusus, TURF, Sasi	LIPI, KKP, MENKO MARITIM
9.	Air Bersih	Sampah plastik, micro-plastic, sampah lainnya, pembuangan limbah,	MENKO, UNIVERSITAS LOKAL
10.	Keragaman hayati	Keberlanjutan ekosistem, indeks keragaman spesies	LIPI, KKP, MENKO MARITIM

1.2.3 Produksi Perikanan Tangkap

Tren total produksi perikanan tangkap naik sebesar 3,11% per tahun dengan rincian produksi perikanan laut naik sebesar 3,03% dan produksi perairan darat sebesar 5,87% per tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2019 sebesar 7,53 juta ton dengan rincian

6,9 juta ton perikanan laut (92% total produksi perikanan tangkap) dan 550 ribu ton perairan darat (8% dari produksi perairan darat). Tahun 2016 terjadi penurunan produksi sebesar 1,45% dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan produksi sebesar 7,37% dan 1,48%. Terjadi penurunan produksi perairan darat pada tahun 2019 sebesar 19,52% dibanding tahun 2018.

1.2.4 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya Indonesia tahun 2017 sebesar 16,11 juta ton, terdiri dari ikan 5,65 juta ton dan rumput laut 10,45 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan budidaya terbesar kedua di dunia setelah China, dengan sumbangan 15% dari total produksi dunia (FAO 2018). Pada produksi komoditas budidaya laut, Indonesia juga masuk kedalam 5 produsen terbesar dunia, antara lain Rumput Laut pada peringkat kedua setelah china, yaitu 30,64 % dari total produksi dunia, komoditi Kerapu pada peringkat ketiga setelah China dan Taiwan yaitu sekitar 11,29 % dari total produksi dunia, komoditi Kakap Putih pada peringkat ketiga setelah Malaysia dan Thailand yaitu sekitar 14,28% dari total produksi dunia (Fish Stat FAO, 2019).

Produksi udang pada tahun 2019 sebesar 517.397 ton dengan nilai produksi sebesar 36,22 Triliun sedangkan target peningkatan produksi udang pada tahun 2024 sebesar 1,29 juta ton dengan nilai produksi sebesar 90,30 Triliun, sehingga membutuhkan peningkatan produksi sebesar 772.608 Ton dan akan mengalami peningkatan nilai produksi sebesar 54,08 Triliun. Untuk memenuhi target produksi udang pada tahun 2024 membutuhkan lahan sebesar 86.000 Ha atau 860 Kawasan tambak udang dengan produksi sebesar 1.500 ton/ tahun/ kawasan.

1.2.5 Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Udang menjadi komoditas ekspor tertinggi dengan nilai sebesar 1.719,04 juta dollar AS (sebesar 35%). Negara tujuan ekspor Amerika Serikat 1.829 juta dollar AS (37%), China 828 juta dollar AS (17%), Jepang 665 juta dollar AS (13%), negara ASEAN 545 juta dollar AS (11%), Uni Eropa 389 juta dollar AS (8%), dan lainnya 668 juta dollar AS (14%).

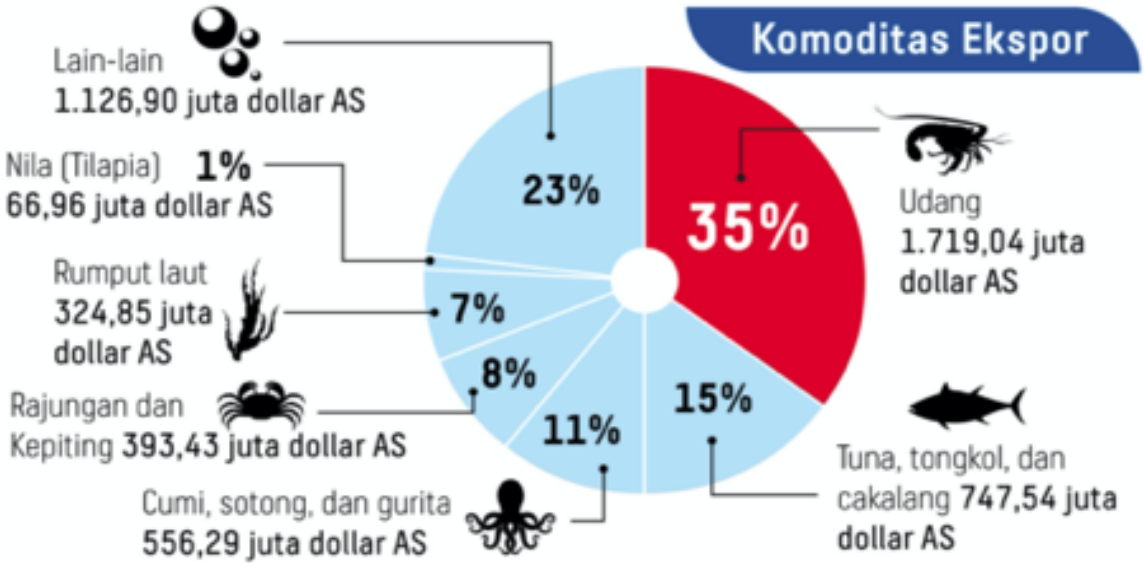

Grafik 1 Perbandingan Nilai Komoditas Ekspor Produk Perikanan

Berdasarkan data KKP tahun 2018, Ikan hias merupakan salah satu komoditas ikan hidup yang dominan dilalulintaskan antar provinsi di Indonesia. Hal ini seiring dengan terus membaiknya kinerja ekspor ikan hias Indonesia. Tahun 2017 nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai USD 27,61 Juta dan merupakan nilai ekspor ikan hias tertinggi dalam enam tahun terakhir (BPS, 2018). Membaiknya kinerja ekspor ikan hias tersebut turut mendorong kinerja lalu lintas ikan hias antar provinsi di Indonesia. Keberadaan ikan hias sebagai salah satu bisnis produk perikanan juga didukung oleh Perpres 3 tahun 2017.

1.2.6 Produksi Garam

Kebutuhan Garam tahun 2019 sebanyak 4.566.753 ton, dipenuhi dari produksi garam lokal sebanyak 2.852.125 ton (62%) dan impor sebanyak 2.724.772 ton (38%). Rincian produksi garam lokal terdiri dari Petambak 2.427.427 ton (85,10%) dan PT. Garam sebesar 424.698 ton (14,90%). Selama kurun waktu 2015-2019 rata-rata kenaikan kebutuhan garam per tahun sebesar 325 ribu ton. Kenaikan kebutuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 600 ribu ton. Produksi garam lokal mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2016 sebesar 99,3%. Produksi garam rakyat hanya

mencapai 4% dari target yang sudah ditetapkan, karena anomali cuaca La Nina yang memicu kemunculan kemarau basah. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sangat signifikan sebesar 144%, jika dibandingkan dengan tahun 2017.

1.3 Profil Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsi Deputi SD Maritim sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja ini dipimpin oleh satu orang Deputi dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan.

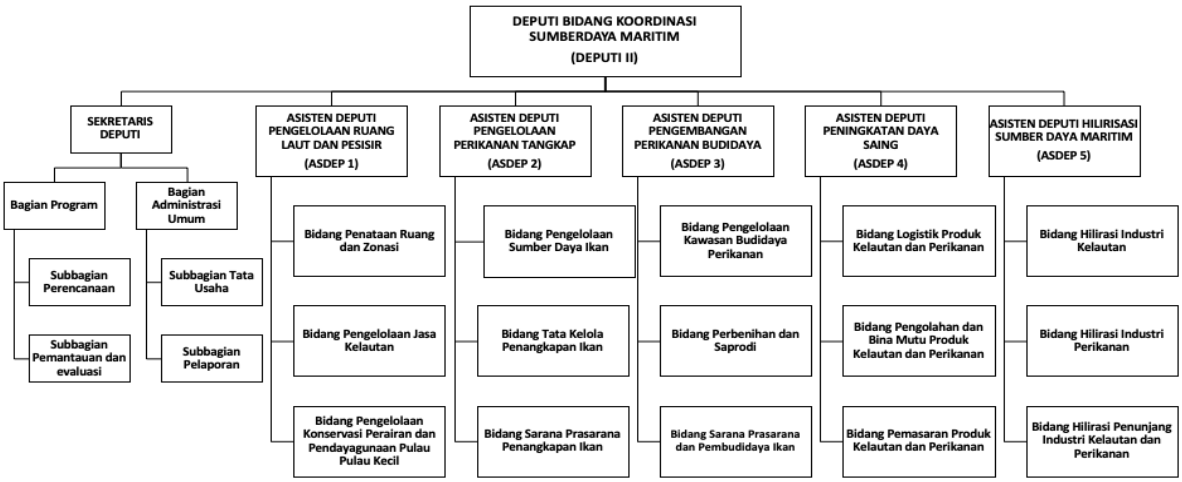

Gambar 2 Struktur Organisasi Deputi SD Maritim

2 Potensi dan Permasalahan

2.1 Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan indonesia adalah 6,4 juta km2 yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km2, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km2, dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km2. Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km2, luas landas kontinen 2,8 juta km2 dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2019).

Potensi lestari SDI Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2016). Dari seluruh potensi SDI tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, namun pada tahun 2017 baru dimanfaatkan sebesar 6,60 juta ton atau 65,8% dari JTB. Sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan PUD) adalah 7,07 juta ton.

Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang; budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng; serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, dan lain-lain. Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2.8 juta ha (15.8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16.5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67.7%). Pemanfaatan potensi lahan tersebut belum optimal yaitu rata-rata baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Besarnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan menjadi modal dalam menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

Indonesia memiliki Luasan potensi budidaya laut seluas 2.886.185 hektar (RZWP3K 24 Provinsi), sedangkan perairan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan budidaya laut baru sekitar 9,6 % atau seluas 277.397 Hektar (DJPB, 2019). Provinsi yang memiliki potensi pengembangan lahan terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur (861.000 Ha) dan Sulawesi Selatan (598.000 Ha). Terlampir disampaikan data luasan potensi dan realisasi per provinsi.

Kapasitas produksi industri pengolahan ikan mencapai 10.51 juta ton/tahun sedangkan volume produksi yang dihasilkan masih sekitar 6,51 juta ton/tahun (4.826.513 ton industri skala mikro kecil; 1.678.711 skala menengah dan besar) (KKP, 2018).

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki beragam potensi pengembangan *marine bioproduct and biotechnology*. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Pesisir dan laut Indonesia IPB disebutkan bahwa potensi bioteknologi kelautan di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan nilai ekonomi yang mencapai US$ 50 Miliar

per tahun. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Nilai ekonomi yang didapat dalam pengembangan HPI yaitu perusahaan membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dengan potensi peningkatan pendapatan setiap nelayan Rp 1.5-2 juta per bulan. Studi kelayakan yang telah dilakukan untuk dapat memproduksi 2 ton HPI per bulan membutuhkan investasi sebesar Rp 2 Miliar dimana kebutuhan bahan baku ikan 10 ton per bulan dengan penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 14 orang. Harga jual HPI yang tinggi yaitu Rp. 300.000 per kg dengan HPP 144.731 per kg akan meningkatkan gross margin sebesar 51.76% dengan *return of investment* (ROI) selama 30 bulan.

2.2 Permasalahan

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas koordinasi sumber daya maritim:

- Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Provinsi mengelola laut dari 0-12 mil, sehingga setiap Provinsi diwajibkan untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang bertujuan untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang laut, tumpang tindih kegiatan serta tarik ulur kepentingan;
- Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan sektor kelautan dan perikanan khususnya stok ikan di WPPN RI perlu pengendalian penggunaan alat penangkapan ikan yang bersifat destruktif, pengaturan penangkapan di beberapa WPPN RI;
- Penguataan sistem pengawasan pemanfaatan SDI untuk untuk mengatasi maraknya aktivitas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*;

- Potensi bibit, benih dan pakan lokal yang secara masif dikembangkan dibeberapa wilayah, dapat mengatasi kekurangan bibit, benih unggul, pakan berkualitas dengan harga relatif murah;
- Tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan adalah biaya logistik yang relatif tinggi dan belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Potensi perikanan paling banyak berada di KTI, namun industri pengolahan perikanan berada di KBI. Masifnya pembangunan infrastruktur di KTI selama periode 2014-2019 dan akan berlanjut dalam periode 2020-2024 dapat menurunkan biaya logistik, sehingga harga produk kelautan dan perikanan dapat bersaing;
- Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan dapat mengurangi ekspor produk perikanan dalam bentuk bahan baku dan meningkatkan diversifikasi produk olahan;
- Pengembangan Industri Garam Nasional dengan fokus meningkatkan nilai nacl dari garam rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan garam industri dibeberapa wilayah yang memiliki potensi untuk meningkatkan produksi garam dan mengurangi impor;
- Masyarakat Indonesia masih menghadapi permasalahan kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*), salah satu penyebabnya karena kekurangan energi protein dan di sisi lain prevalensi penyakit meningkat sebagai akibat miskinnya pengetahuan tentang kesehatan. Beberapa wilayah di Indonesia dengan tingkat *stunting* tinggi, tapi di sisi lain memiliki potensi perikanan melimpah dapat memanfaatkan ikan melalui kearifan lokal sebagai sumber protein tambahan, karena ikan mempunyai keunggulan komparatif dibanding sumber pangan protein lainnya (hewan terestrial).

BAB
2

VISI, MISI DAN TUJUAN

1 Visi

Merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi/lembaga, visi Deputi SD Maritim diselaraskan dan mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 yaitu:

Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai salah satu unit yang bertugas untuk membantu Menteri dalam mewujudkan visi tersebut maka rumusan visi Deputi SD Maritim 2020 - 2024 adalah:

> ***"Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju"***

Visi ini dapat dimaknai bahwa Sumber Daya Maritim yang ada di wilayah Indonesia harus dikelola secara mandiri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutannya tetap terjaga.

2 Misi

Misi menggambarkan segala sesuatu usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang harus dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 untuk mendukung Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu:

> ***Misi ke-1 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;***
>
> ***Misi ke-2 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;***
>
> ***Misi ke-3 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.***

Ke 3 (tiga) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

3 Tujuan

Pembangunan jangka menengah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2020 - 2024 bertujuan untuk:

1. Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim;
2. Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan.

4 Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim diarahkan untuk:

1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

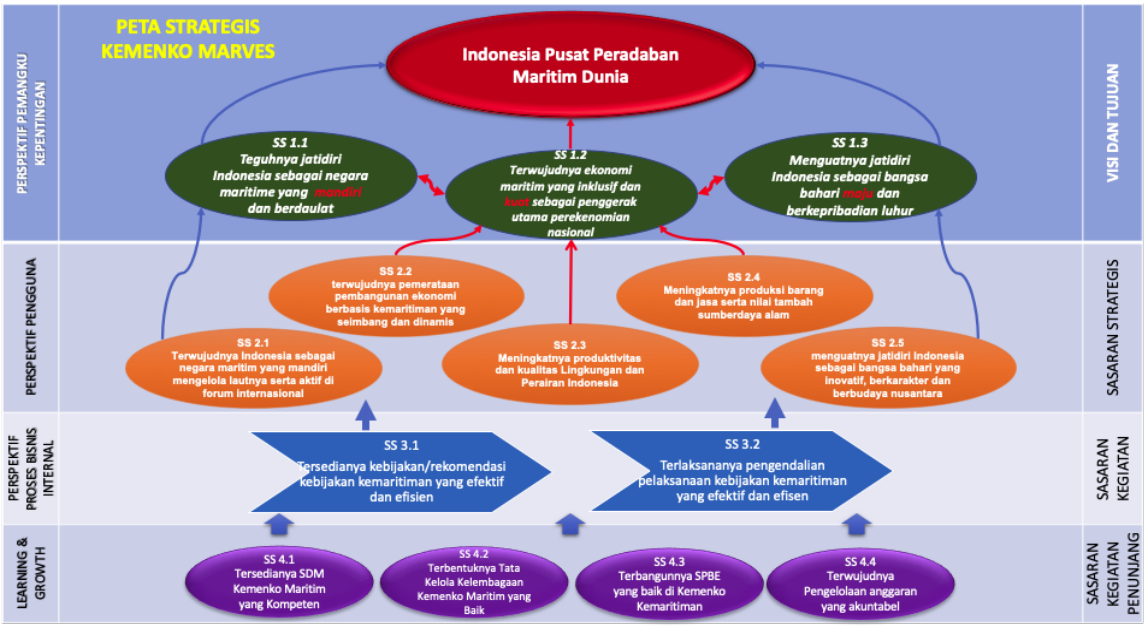

Gambar 3 Peta Strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Peta strategis Deputi SD Maritim membagi sasaran Deputi ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu 1) terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim; dan 2) tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan.

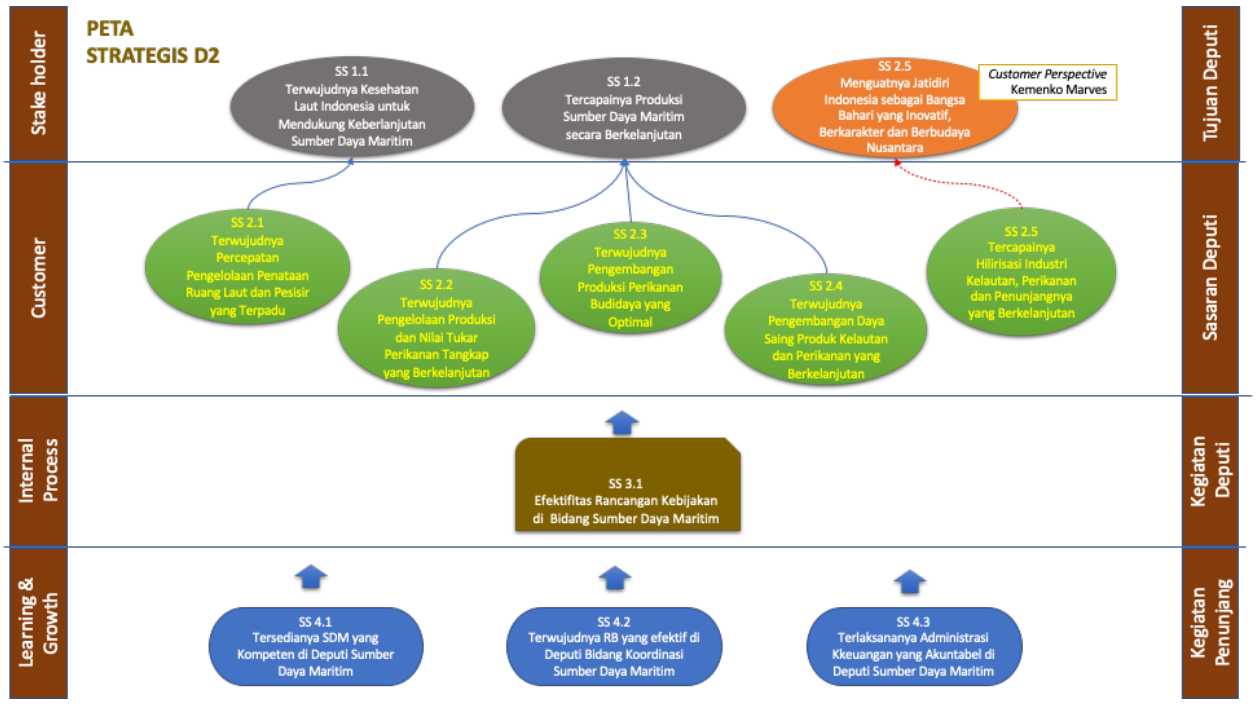

Gambar 4 Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sasaran strategis deputi "Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan" langsung *cascading* untuk mendukung sasaran strategis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi "Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara". Berikut adalah tabel Sasaran Srategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024:

Tabel 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024	Unit Pelaksana
Stakeholder Perspective	SS 1.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Nilai	65	67	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024	Unit Pelaksana
		Sumber Daya Maritim					
	SS 1.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	%	60	100	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
Customer Perspective	SS 2.1	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	%	60	100	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
	SS 2.2	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	%	60	100	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap
	SS 2.3	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	%	60	100	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
	SS 2.4	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	%	60	100	Asdep Peningkatan Daya Saing
	SS 2.5	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan	Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang	%	60	100	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024	Unit Pelaksana
			Berkelanjutan				
Internal Business Processes	SS 3.1	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	%	50	100	Seluruh Asdep
			Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan	%	50	100	
Learning and Growth Perspective	SS 4.1	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Persentase Pejabat Deputi Bidang Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	%	80	100	Sekretariat Deputi
	SS 4.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi	Nilai	65	85	Sekretariat Deputi
			Nilai Evaluasi Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	75	90	Sekretariat Deputi
	SS 4.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi	Nilai	90	99	Sekretariat Deputi

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024	Unit Pelaksana
		Sumber Daya Maritim					

Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah detail penjelasan dari masing-masing perspektif:

4.1 Stakeholder Perspective

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai, yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu (SS 1.1) adalah **"Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim"** dengan indikator kinerja:

   - **Indeks Kesehatan Laut Indonesia**

     Ocean Health Index (OHI) atau Indeks Kesehatan Laut adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kualitas kesehatan lingkungan laut. Nilai OHI menunjukan parameter kondisi kesehatan laut, dan bagaimana pengelolaannya untuk keberlanjutan laut di masa depan. Dalam penilaian OHI dibutuhkan pendekatan penilaian untuk mengevaluasi kondisi laut saat ini secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari sisi/perspektif sosial, ekonomi dan lingkungan alam. Laut yang sehat berdasarkan OHI adalah laut yang dapat bermanfaat bagi manusia secara terus menerus (berlanjut) sampai masa mendatang.

     Nilai atau skor OHI adalah dari 0 - 100. Penilaian ini dikembangkan oleh ilmuwan (Halpern et al, 2012, Nature) dan secara global telah dimulai penilaiannya sejak tahun 2012 (Halpern et al., 2015, PLOS One; Halpern et al. in review). Rincian komponen dalam penilaian OHI adalah: penyediaan pangan, peluang pada perikanan tradisional, produk alam, penyediaan karbon, perlindungan pantai, mata pencaharian dan ekonomi masyarakat pesisir, pariwisata, rasa memiliki pada

tempat/lokasi, air bersih, keanekaragaman hayati. Dari keseluruhan penilaian pada indikator-indikator tersebut, pada tahun 2019 nilai OHI Indonesia adalah 65 atau berada pada urutan 137 dari 221 wilayah penghitungan di seluruh dunia. Nilai ini menurun dibandingkan pada tahun 2018 (67) dan berada pada peringkat 113 dari 221 negara (wilayah).

2. Sasaran Strategis kedua (SS 1.2) adalah **"Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan"** dengan indikator kinerja:

- **Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan**

  Sumber daya maritim merupakan salah satu potensi unggulan yang terkandung di laut Nusantara. Dalam konteks kelautan dan perikanan, sumber daya tersebut terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu tangkap dan budidaya. Perairan laut nusantara dibagi kedalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) disesuaikan karakteristik sumber daya ikan yang terdapat didalamnya, dan karakteristik biofisik dinamika laut yang menunjang perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan utama di dunia. Pada tahun 2014, untuk perikanan tangkap, Indonesia menempati urutan kedua setelah China dengan nilai volume 6,48 juta ton atau menyumbang 7,38% perikanan tangkap di dunia (FAO, 2016), dengan komoditas utama Tuna, Tongkol, Cakalang dan Udang. Namun demikian, produksi perikanan mengalami stagnasi dengan rata-rata pertumbuhan kurang dari 3 persen per tahun sejak tahun 2010. Provinsi produsen perikanan tangkap yang terbesar adalah Maluku, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara itu, produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 mencapai 14,5 juta ton dengan komoditas utamanya adalah produk rumput laut (70%). Data FAO menunjukan bahwa Indonesia merupakan produsen kedua di dunia untuk komoditas rumput laut dengan nilai 10,08 juta ton, dan produsen nomor tiga dunia untuk komoditas ikan dengan volume 4,28 juta ton (FAO, 2016).

Potensi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia, bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

4.2 Customer Perspective

Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu (SS 2.1) adalah **"Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu"** dengan indikator kinerja:

   - **Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu**

     Sasaran Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang akan dicapai sesuai RPJMN 2020-2024 adalah meningkatnya pengelolaan tata ruang laut nasional, kawasan strategis dan zonasi daerah dengan indikator jumlah pengelolaan tata ruang laut nasional, kawasan strategis dan zonasi daerah. Target yang akan dicapai pada rentang waktu 2020-2024 yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut mencapai 102 RZ. Pengelolaan ruang laut dan wilayah pesisir terkutip dalam agenda pertama dan agenda keenam. Pada Agenda Pertama memuat rencana penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sedangkan agenda keenam memuat rencana pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dalam agenda pertama tersebut, pengelolaan ruang laut dan pesisir merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas hidup. Sedangkan pada agenda keenam, pengelolaan ruang laut dan pesisir bertujuan dalam mewujudkan strategi pencegahan, penanganan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Sasaran Strategis kedua (SS 2.2) adalah **"Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan"** dengan indikator kinerja:

   - **Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan**

     Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2016). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari dan baru dimanfaatkan sebesar 6,42 juta ton pada tahun 2017 atau baru 63,99% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 6,89 juta ton.

     Potensi perikanan tangkap Indonesia sangat melimpah sehingga pengelolaannya diharapkan menjadi sektor unggulan dalam mendorong perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari dan menjadi tugas serta tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan pengusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara. Peningkatan perikanan tangkap secara berkelanjutan tentunya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang hidup dari usaha perikanan tangkap, khususnya nelayan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya ikan dan ekosistem pendukungnya.

3. Sasaran Strategis ketiga (SS 2.3) adalah **"Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal"** dengan indikator kinerja:

   - **Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal**

     Pada tahun 2019, data KKP menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya menjadi 17,25 juta ton, yang mencakup 6,88 juta ton ikan budidaya (termasuk udang) dan 10,37 juta ton rumput laut. Konsumsi ikan masyarakat juga

terus meningkat dari 41,11 kg/ kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 50,7 kg/ kapita/ tahun. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi khusus Presiden Jokowi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa pada tahun 2020 – 2024, salah satunya adalah fokus pengembangan perikanan budidaya yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 bahwa penguatan ketahanan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan sumber daya kemaritiman, kelautan, dan perikanan.

Target nasional yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024 berdasarkan dokumen RPJMN adalah pertumbuhan produksi rumput laut menjadi 12,3 juta ton, peningkatan produksi ikan menjadi 20,4 juta ton pada tahun 2024, Kawasan klaster sentra industri perikanan budidaya unggulan sebanyak 50 kawasan, Nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 105. Selain itu juga peningkatan ekspor perikanan menjadi senilai USD 8,2 Miliar.

4. Sasaran Strategis keempat (SS 2.4) adalah **"Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan"** dengan indikator kinerja:

   - **Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan**

     Sasaran produk perikanan bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri melalui kegiatan ekspor. Produk perikanan dalam negeri sendiri dari tahun ke tahun jumlah peminat nya semakin meningkat, hal tersebut terlihat dari data konsumsi ikan yang terus meningkat dari 41,1 kg/kapita/tahun pada Tahun 2015 menjadi 50,7 kg/kapita/tahun pada Tahun 2018. Pada Tahun 2020 ditargetkan nilai konsumsi ikan meningkat menjadi 58,3 kg/kapita/tahun dan pada Tahun 2024 nilai konsumsi dapat tercapai 60,9 kg/kapita/tahun. Kemudian terkait ekspor hasil perikanan, pada tahun 2020 ditargetkan tercapai USD 6,2 Miliar dan pada tahun 2024 ditargetkan nilai ekspor hasil perikanan USD 8,0 Miliar.

Peningkatan daya saing produk perikanan adalah suatu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk perikanan yang dihasilkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan daya saing usaha dan produk hasil perikanan adalah dengan pengefisienan usaha, mutu dan keamanan produk. Peningkatan daya saing juga dapat dilakukan dengan melakukan inovasi dalam pemasaran produk perikanan. Penguatan branding produk perikanan Indonesia dan pengembangan sistem pemasaran produk perikanan berbasis digital merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan daya saing,

Peningkatan daya saing perikanan telah terkutip dalam agenda pertama pada 7 agenda pembangunan RPJMN, yang yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sasaran Peningkatan Daya Saing Perikanan yang akan dicapai sesuai RPJMN 2020-2024 adalah meningkatnya daya saing perikanan yang kemudian dipetakan dalam 4 sasaran dengan indikatornya terkait peningkatan/pertumbuhan PDB perikanan, jumlah sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, jumlah konsumsi ikan dan juga terkait nilai ekspor hasil perikanan.

5. Sasaran Strategis kelima (SS 2.5) adalah **"Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan"** dengan indikator kinerja:

- **Persentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Bekelanjutan**

  Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 dijelaskan bahwa hilirisasi industri sumber daya alam laut merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan. Hilirisasi industri juga merupakan salah satu visi yang diamanatkan Presiden yang ditargetkan pencapaiannya pada Tahun 2045. Dalam sektor perikanan, hilirisasi yang perlu difokuskan adalah pada sektor industri garam, rumput laut dan komoditas perikanan lainnya.

Asumsi konseptual berdasarkan beberapa sumber disebutkan bahwa hilirisasi membutuhkan dukungan instrumen penguat, yakni: ketersediaan bahan baku, pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia, nilai investasi, infrastruktur (sarana dan prasarana), penguasaan teknologi, stabilitas ekonomi, dukungan pemerintah. Ketersediaan bahan baku merupakan bagian awal dari proyek hilirisasi dimana ketersediaan akan menentukan kuantitas jumlah produksi atas hasil kebutuhan. Kondisinya, selama ini ketersediaan bahan baku produk kelautan dan perikanan di Indonesia sangat melimpah dan masih dianggap memiliki keberlanjutan, misalnya rumput laut, garam, udang, ikan dan produk kelautan perikanan lainnya.

Hilirisasi sumber daya maritim telah terkutip dalam agenda pertama pada 7 Agenda Pembangunan RPJMN yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sasaran Hilirisasi Sumber daya Maritim yang akan dicapai sesuai RPJMN 2020-2024 adalah meningkatnya hilirisasi sumber daya maritim dengan indikatornya terkait jumlah produksi garam. jumlah unit bisnis bio farmakologi yang dibangun, jumlah teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan, jumlah konsumsi ikan dan ketersediaan protein, nilai tambah produk perikanan, jumlah produksi perikanan dan rumput laut serta jumlah pendanaan pelaku usaha perikanan, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih serta jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan.

4.3 Internal Business Process

Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu (SS 3.1) adalah **"Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim"** dengan indikator kinerja:

- **Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi**

  Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rancangan kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang menjadi kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi. Target awal pada tahun 2020 50% rancangan kebijakan yang dijadikan kebijakan Menteri dan 100% pada tahun 2024.

- **Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan**

  Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian rekomendasi pengendalian kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta hilirisasi sumber daya maritim yang dilaksanakan.

4.4 Learning and Growth Perspective

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang akan dicapai yaitu:

1. Sasaran Strategis kesatu (SS 4.1) adalah **"Tersedianya SDM di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Kompeten"** dengan indikator kinerja:

   - **Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi**

     Indikator ini menggambarkan kesesuaian kompetensi pejabat struktural dan fungsional yang akan mengisi jabatan sesuai dengan struktur organisasi dengan target awal 80% pada tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2024.

2. Sasaran Strategis kedua (SS 4.2) adalah **"Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim"** dengan indikator kinerja:

- **Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah sebuah rangkaian sistematik yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pada instansi pemerintah. SAKIP diselenggarakan melalui penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada instansi pemerintahan, salah satunya pada tingkatan entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 6 hal, yang adalah: 1) Rencana Strategis; 2) Perjanjian Kinerja; 3) Pengukuran Kinerja; 4) Pengelolaan Data Kinerja; 5) Pelaporan Kinerja; dan 6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

- **Nilai Evaluasi Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, Indikator ini mencakup 8 (delapan) area perubahan yang akan dinilai KemenPAN dan RB antara lain: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksana; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan 8) Penguatan Pengawasan.

Sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi SD Maritimmenyesuaikan dengan sasaran pelaksanaan pada Lingkup Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, yang adalah mewujudkan pelaksanaan pada unit secara transparansi, bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien dan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Kunci sukses dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah adanya komitmen pimpinan, keteladanan berperilaku, terdapat individu (pegawai) sebagai Unsur Penggerak Utama Perubahan (AOC), adanya dukungan inovasi dan IT pada pelaksanaan kinerja di unit dan adanya perubahan pola pikir (*Mind Set*) dan budaya kerja (*Culture Set*).

3. Sasaran Strategis ketiga (SS 4.3) adalah **"Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim"** dengan indikator kinerja:

   - **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

     Indikator ini menggambarkan capaian pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, selain itu untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Target realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar 90% dari total anggaran meningkat menjadi 99% di tahun 2024.

BAB

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi RPJMN 2020 - 2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai Visi dimaksud dicapai melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas, korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

5 (lima) poin pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada saat pelantikan, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;

2. Pembangunan Infrastruktur;

3. Penyederhanaan Regulasi;

4. Penyederhanaan Birokrasi; dan

5. Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020 - 2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan

7. Stabilitas politik, hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Agenda Pembangunan yang mendukung Sektor Kelautan dan Perikanan adalah Prioritas Nasional 1 (PN 1), Prioritas Nasional 2 (PN 2), Prioritas Nasional 3 (PN 3), Prioritas Nasional 6 (PN 6).

Gambar 5 Prioritas Nasional 1

PN 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan Program Prioritas (PP) 4 Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan dan PP 6 Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Gambar 6 Prioritas Nasional 2

PN 2 mengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan Kegiatan Prioritas 2 Kegiatan Pengembangan Sektor Unggulan.

Gambar 7 Prioritas Nasional 3

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan PP 7 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.

Gambar 8 Prioritas Nasional 6

Sedangkan PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan PP1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan PP 3 Pembangunan Rendah Karbon.

Untuk mencapai sasaran pembangunan RPJMN 2020 - 2024 memuat proyek-proyek yang memiliki daya ungkit tinggi (Major Projects/ Proyek Strategis Nasional). Jumlah Major Project (MP) sebanyak 41 MP yang merupakan proyek strategis yang terintegrasi baik dari K/L; Pusat - Daerah - BUMN - Masyarakat. MP yang terkait dengan sektor Kelautan dan Perikanan adalah MP Transformasi Ekonomi yaitu Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng (target: meningkatnya produksi perikanan budidaya ikan menjadi 10,32 juta ton) dan Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional (target: meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024.

Selain itu ada 100 Janji Presiden yang harus dikawal dan diselesaikan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dari 100 Janji tersebut terdapat 5 janji yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Menguatkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi (Janji No. 43);
2. Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian (Janji No. 44);
3. Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya (Janji No. 49);
4. Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui inovasi teknologi yang dapat menguatkan budi daya ikan yang berkelanjutan dan produktif, salah satunya adalah dengan pengembangan *offshore aquaculture* (Janji No. 58);

5. Pangan laut berkelanjutan (Janji No. 77)
    a. Teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan;
    b. Melestarikan laut.

Ada sejumlah isu strategis lintas K/L yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, adalah:

1. Indeks Kesehatan Laut
2. Pengelolaan Labuh Jangkar dan Kabel Bawah Laut
3. Penetapan MA CITES Jenis Ikan
4. Pengembagan Terpadu WPP
5. Peningkatan Produksi Udang
6. Pengembangan Budidaya Laut
7. Pengelolaan Logistik Perikanan
8. Sumber Daya Air
9. Pengembangan Industri Garam

2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020-2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai

Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar.

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020 - 2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi antara lain: 1) pembangunan kedaulatan maritim; 2) pembangunan berbasis negara kepulauan; 3) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; 4) penguatan industri dan jasa kemaritiman; dan 5) penguatan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Agenda pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang terkait dengan Deputi SD Maritim adalah Agenda pembangunan 2 dan 5.

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi berbagai potensi ekonomi, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan ini harus bijaksana dengan memperhatikan kelestariannya agar generasi yang akan dapat dapat ikut menikmatinya. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk menjaga produktivitas dan kualitas lingkungan perairan. Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia, berbagai upaya harus dilaksanakan.

Pencapaian agenda pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas perairan, arah kebijakannya:
    - ***Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan*** *dapat diwujudkan melalui strategi:*

1) Mewujudkan capaian produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan

2) Mewujudkan capaian produksi perikanan budidaya yang optimal;

3) Mewujudkan capaian daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

- Selanjutnya terkait dengan kualitas lingkungan dan perairan arah kebijakannya:

  - ***Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim*** *dapat dicapai melalui strategi:*

    1) Peningkatan pengelolaan ruang laut dan pesisir yang terpadu

2. Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- ***Meningkatkan inovasi yang berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya maritim, dapat diwujudkan melalui strategi:***

  1) Mewujudkan capaian hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya secara berkelanjutan.

3 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Dalam rangka mendukung visi Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju arah kebijakannya adalah:

1. Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu, dapat dicapai melalui strategi:

a) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Penataan Ruang dan Zonasi Wilayah Laut dan Pesisir;

b) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan;

c) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau Pulau Kecil.

2. Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan, dapat dicapai melalui strategi:

a) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

b) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Tata Kelola Penangkapan Ikan;

c) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.

3. Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal, dapat dicapai melalui strategi:

a) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;

b) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Perbenihan dan Sarana Produksi;

c) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

4. Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, dapat dicapai melalui strategi:

a) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;

b) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;

c) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

5. **Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan, dapat diwujudkan melalui strategi:**

a) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Hilirisasi Industri Kelautan;

b) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Hilirisasi Industri Perikanan;

c) Mengoordinasikan, Menyinkronkan dan Mengendalikan Kebijakan Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan.

4 Kerangka Regulasi

Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang berkelanjutan mengacu kepada sejumlah peraturan seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri yang telah diterbitkan antara lain:

1. **Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir:**

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*);

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;

d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

e) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang pengesahan

f) *Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958*;

g) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

h) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut;

i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Bangunan dan Instalasi Laut.

2. Peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan:

a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

c) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

3. Peraturan yang mengatur tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Nomor Per.27/Men/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1 Target Kinerja

1.1 Indikator Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian tujuan. Sasaran Deputi SD Maritim merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah bersifat menyeluruh, serta mempermudah upaya pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah mengidentifikasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Deputi SD Maritim Tahun 2020-2024

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024					Unit Pelaksana
						2020	2021	2020	2023	2024	
Stakeholder Perspective	SS 1.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Nilai	65	65	65	66	66	67	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
	SS 1.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
Customer Perspective	SS 2.1	Terwujudnya Percepatan Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
	SS 2.2	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap
	SS 2.3	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
	SS 2.4	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Peningkatan Daya Saing
	SS 2.5	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan	Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan	%	60	60	70	80	90	100	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Baseline 2019		Target 2024					Unit Pelaksana
						2020	2021	2020	2023	2024	
Internal Business Processes	SS 3.1	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	%	50	60	70	80	90	100	Seluruh Asdep
			Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan	%	50	60	70	80	90	100	
Learning and Growth Perspective	SS 4.1	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Persentase Pejabat Deputi Bidang Sumber Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi	%	80	80	85	90	95	100	Sekretariat Deputi
	SS 4.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi	Nilai	65	67	70	75	80	85	Sekretariat Deputi
			Nilai Evaluasi Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai	75	75	78	80	85	90	Sekretariat Deputi
	SS 4.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi	Nilai	90	93	95	96	97	99	Sekretariat Deputi

1.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 dan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar program pada Kementerian/Lembaga dibuat lebih fokus untuk mencapai target pembangunan nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kementerian Keuangan telah melakukan kesepakatan bersama terkait dengan penyempurnaan dan restrukturisasi nomenklatur program dan kegiatan. Hal ini ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Bersama antara Deputi Bidang Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah disepakati nomenklatur program yang akan digunakan ada 2 (dua), yaitu Program Generik (bersifat pendukung) dan Program Teknis. Untuk Program Generik yang digunakan adalah Program Dukungan Manajemen, sedangkan Program Teknis yang akan digunakan adalah Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh Asisten Deputi lingkup Deputi Sumber Daya Maritim. Kedua Program tersebut digunakan seluruh unit Eselon I dan merupakan program lintas deputi pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tabel 5 Indikator Kinerja Program (IKP)

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target					Unit Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang Sumber Daya Maritim	Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim	100	100	100	100	100	Seluruh Asdep
			Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Sumber Daya Maritim yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	27	30	45	45	45	Seluruh Asdep
2.	Dukungan Manajemen Internal	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitas koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Sumber Daya Maritim di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Terwujudnya tata kelola yang baik di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	100	100	100	100	100	Sekretariat Deputi

1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Sesuai dengan RSPP Deputi SD Maritim memiliki 6 (enam) kegiatan yang merupakan representasi dari unit kerja Eselon II. Kegiatan tersebut dikelompokkan dalam Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan didalam KRO terdapat Rincian Output (RO). Deputi SD Maritim menggunakan 7 (tujuh) KRO dan 13 RO dengan rincian 3 (tiga) KRO digunakan oleh unit Asisten Deputi dan 4 (empat) KRO digunakan unit Sekretariat Deputi. Ke-3 KRO tersebut antara lain: KRO Koordinasi, KRO Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam dan KRO Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan. Sedangkan ke-4 KRO di Sekretariat Deputi antara lain: KRO Layanan Perencanaan dan Pengangaran Internal, KRO Layanan

Umun, KRO Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, dan KRO Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal. Rincian Kegiatan, KRO dan RO Deputi SD Maritim dapat dilihat pada Gambar 9.

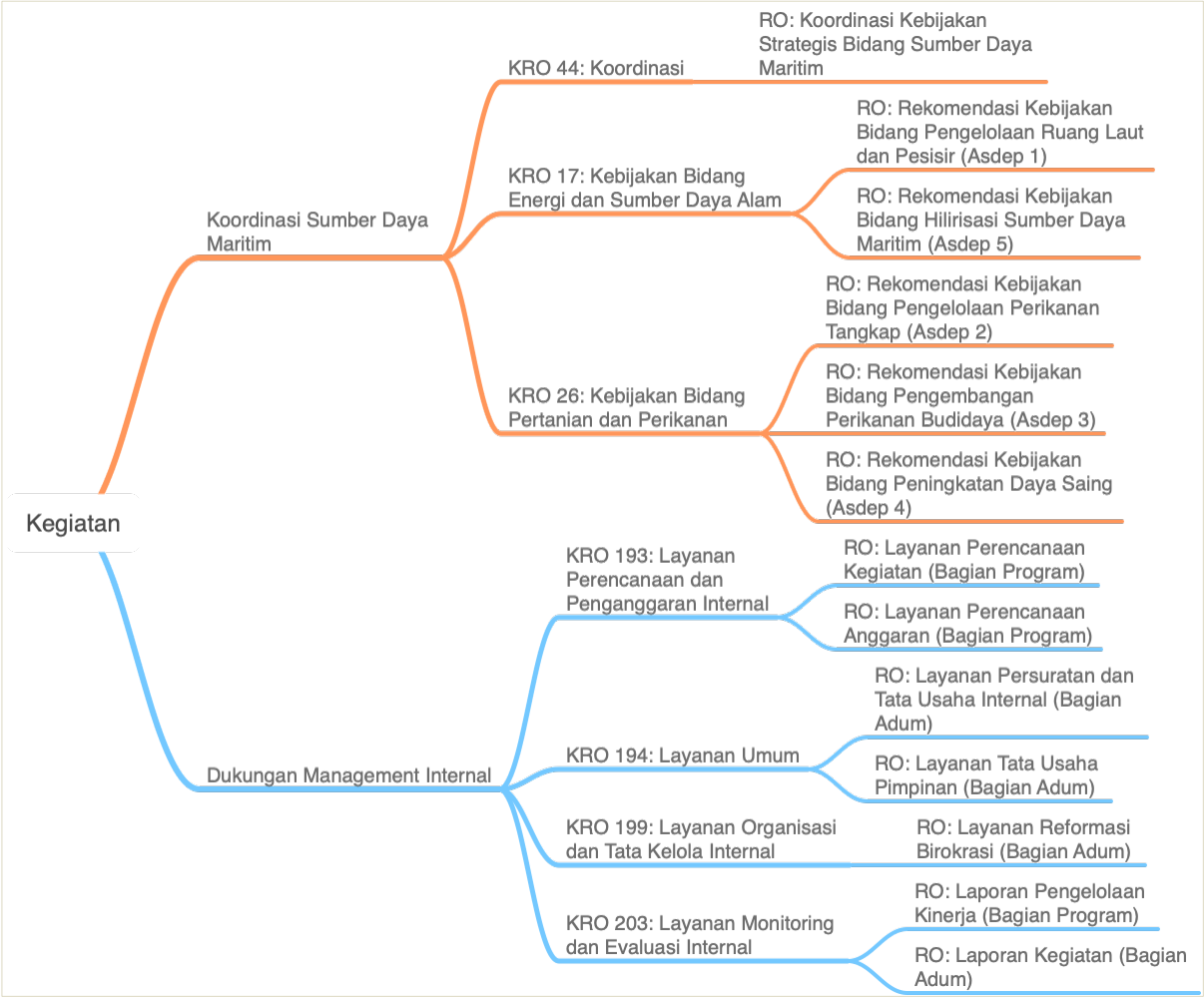

Grafik 2 Mapping Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output
dan Rincian Output Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan									
1.	Koordinasi Kebijakan Strategis Bidang Sumber Daya Maritim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisai dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim	Jumlah koordinasi bidang Sumber Daya Maritim yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	Seluruh Asdep
2.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir	6	6	9	9	9	Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
3.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap	6	6	9	9	9	Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap
4.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengembangan perikanan budidaya	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengembangan perikanan budidaya	6	6	9	9	9	Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
5.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan daya saing	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan daya saing	3	6	9	9	9	Asdep Peningkatan Daya Saing

6.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim	6	6	9	9	9	Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim
Program Dukungan Manajemen Internal									
7.	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Terselenggaraan ya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Jumlah layanan kesekretariat-an Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2	2	2	2	2	Sekretariat Deputi

2 Kerangka Pendanaan

Agenda pembangunan Sumber Daya Maritim dilaksanakan dengan berbagai skema pendanaan, yaitu:

1. Pendanaan melalui skema APBN dan APBD, diutamakan untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dasar kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pertahanan keamanan, dan peningkatan keselamatan maritim;
2. Pendanaan melalui skema PHLN, diutamakan untuk kegiatan pengembangan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, serta penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan keselamatan maritim, energi, investasi dan pertambangan serta pengembangan sumber daya manusia yang belum teralokasikan melalui skema APBN dan APBD;
3. Pendanaan melalui skema investasi dalam negeri, diutamakan untuk pengembangan sumber daya alam, termasuk pembangunan industri berbasis sumber daya alam;

4. Pendanaan melalui skema investasi luar negeri, diutamakan untuk kegiatan pengembangan industri manufaktur, jasa kemaritiman termasuk konektivitas, pertambangan, pariwisata, dan jasa logistik;
5. Pendanaan melalui skema *Blended Finance*.

BAB 5

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputi SD MaritimPeriode Tahun 2020 – 2024 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun untuk waktu berkala (5 tahun) yang telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024.

Dokumen Renstra Deputi SD Maritim telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada dokumen renstra ini juga telah dijelaskan terkait arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Deputi SD Maritim Periode Tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran pegawai (ASN dan non ASN) pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, sehingga dapat memaksimalkan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam substansi bidang sumber daya maritim. Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Dokumen Renstra Periode 2020 – 2024 ini, sangat penting

untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan jika pada waktu berjalan terdapat perubahan, maka dokumen renstra akan disesuaikan kembali.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM													
SS 1.1	Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim												Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
	Indeks Kesehatan Laut Indonesia		65	65	66	66	67						
SS 1.2	Tercapainya Produksi Sumber Daya Maritim secara Berkelanjutan												Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Asdep Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan (%)		60	70	80	90	100						
SS 2.1	Terwujudnya Percepatan												Asdep Pengelolaan

	Pengelolaan Penataan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu												Ruang Laut dan Pesisir
	Persentase Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir yang Terpadu (%)		60	70	80	90	100						
SS 2.2	Terwujudnya Pengelolaan Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan												Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Persentase Capaian Produksi dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan (%)		60	70	80	90	100						
SS 2.3	Terwujudnya Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal												Asdep Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya yang Optimal (%)		60	70	80	90	100						
SS 2.4	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan												Asdep Peningkatan Daya Saing
	Persentase Capaian Daya Saing Produk Kelautan Perikanan yang		60	70	80	90	100						

	Berkelanjutan (%)												
SS 2.5	Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan												Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim
	Presentase Capaian Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan ()		60	70	80	90	100						
SS 3.1	Efektifitas Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim												Sekretariat Deputi
	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (%)		60	70	80	90	100						
	Persentase Rancangan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim yang Dilaksanakan (%)		60	70	80	90	100						
SS 4.1	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim												Sekretariat Deputi
	Persentase Pejabat Deputi Bidang Sumber		80	85	90	95	100						

	Daya Maritim yang Sesuai Kompetensi (%)												
SS 4.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim												Sekretariat Deputi
	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi		67	70	75	80	85						
	Nilai Evaluasi Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		75	78	80	85	90						
SS 4.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim												Sekretariat Deputi
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Deputi		93	95	96	97	99						
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN													
Kegiatan 1: Koordinasi Kebijakan Strategis Bidang Sumber Daya Maritim													
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisai dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim												Seluruh Asdep
	Jumlah koordinasi bidang Sumber Daya Maritim		5	5	5	5	5	8.000	10.000	15.000	20.000	25.000	

	yang dilaksanakan												
Kegiatan 2: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir													
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir												Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir		6	6	9	9	9	600	800	1.000	1.200	1.400	
Kegiatan 3: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap													
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap												Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan perikanan tangkap		6	6	9	9	9	600	800	1.000	1.200	1.400	
Kegiatan 4: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya													
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengembangan perikanan budidaya												Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang		6	6	9	9	9	600	800	1.000	1.200	1.400	

	pengembangan perikanan budidaya												
Kegiatan 5: Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing													
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang peningkatan daya saing												Asdep Peningkatan Daya Saing
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang peningkatan daya saing		3	6	9	9	9	400	800	1.000	1.200	1.400	
Kegiatan 6: Rekomendasi Kebijakan Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim													
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim												Asdep Hilirisasi Sumber Daya Maritim
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang hilirisasi sumber daya maritim		6	6	9	9	9	600	800	1.000	1.200	1.400	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL													
Kegiatan 7: Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim													
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim												Sekretariat Deputi
	Jumlah layanan kesekretariat-an Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim		2	2	2	2	2	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	

D2

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM